



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 111

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

Pemerintah
Kabupaten Bandung



PERATURAN BUPATI BANDUNG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Seiring dengan perkembangan, dinamika dan paradigma yang menuntut Institusi Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Kecamatan sebagai salah satu institusi Pemerintah harus melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Sehingga perlu adanya perubahan perencanaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek (Renja) Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Tahun 2021 – 2026 dan Rancangan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berarti bahwa setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan, baik pelaksanaannya maupun terhadap kinerjanya yang menghasilkan output dan outcome yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Kecamatan.

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Rancaekek sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan dalam rangka mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan, kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindungan-Nya, Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Rancaekek, Juni 2025
CAMAT RANCAEKEK

Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si
NIP. 19671110 199402 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN LALU	7
	2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Rancaekek Tahun Lalu	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek ..	18
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	42
	3.3 Program dan Kegiatan	65
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	84
BAB V	PENUTUP	96

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Rancaekek sesuai dengan Tupoksinya berkinerja dan bekerja sesuai dengan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Tahun 2021 – 2026.

Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) sangat penting guna mendukung arah dan kepastian program kerja PD khususnya Kecamatan Rancaekek di Tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga dalam penyusunannya sangat memperhatikan isu-isu strategis dan potensi yang ada.

Peyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 guna memberikan gambaran yang utuh terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 di Kecamatan Rancaekek.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung tahun 2023 Nomor 120);
17. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk:

1. Membuat perencanaan yang berkesinambungan,
2. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung,
3. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Kecamatan ditetapkan dengan tujuan untuk menghitung proyeksi kebutuhan, besaran target pada tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program, kegiatan dan sub. kegiatan untuk 1 (satu) tahun rencana, sesuai dengan tugas fungsi dan tata kerja serta kewenangan Perangkat Daerah tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Rancaekek, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen RKPD, renstra PD, dengan renja K/L dan renja provinsi serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan tentang Penjelasan UU, PP, perda, dan peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan Kecamatan, serta pedoman yang dijadikan acuan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan Rancaekek.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Rancaekek serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Rancaekek Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Rancaekek,
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek,
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rancaekek,
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi Kecamatan Rancaekek.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rancaekek

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rancaekek yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Rancaekek.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Berisikan penjelasan mengenai :
Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal: pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian SDG-S,

pencapaian NSPK dan SPM, pengentasan kemiskinan, pengembangan daerah terisolir, dst.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan,
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu),
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Anggarannya

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Rancaekek Tahun Lalu

OPD Kecamatan Rancaekek telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, dan realisasi Renstra OPD Kecamatan Rancaekek yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel T.C-29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan 2025 didasarkan pada DPA Kecamatan Rancaekek TA 2025 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi kinerja s.d. bulan Mei Tahun 2025 disesuaikan dengan hasil input data e-monev pada Aplikasi Sidalmonep Bapperida kabupaten Bandung yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif.

Hasil Evaluasi yang tersaji memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar pelaksana-pelaksana kegiatan di Kecamatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja Program di Kecamatan Rancaekek yang secara keseluruhan mencapai 100%, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat selisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Meskipun pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

- a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan,
- b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik secara kualitas dan kuantitas belum optimal,
- c. Perubahan Kebijakan/Aturan.

Data Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rancaekek Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rancaekek s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kabupaten Bandung sebagaimana pada tabel T.C- 29 di bawah ini.

Tabel T.C-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Rancaekek dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Rancaekek s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n - 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	8	4	4	100	4	16	80%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4	3	0	0	0	1	4	100%

7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	3	0	0	0	1	4	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	3	0	0	0	1	4	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	3	0	0	0	1	4	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	12	4	4	100	4	16	80%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	3	0	0	0	1	1	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	30	30	100	30	30	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	4	2	2	100	2	8	80%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	10	4	2	2	100	2	8	60%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	100	1	1	100%
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120	0	44	44	100	44	88	73%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	4	80%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	4	80%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	4	80%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	3	1	1	100	1	4	80%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	4	2	2	100	2	8	80%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	24	12	12	100	12	48	80%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	24	12	12	100	12	48	80%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	0	1	1	0	3	4	57%

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	4	2	2	100	2	8	80%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	6	3	3	100	3	12	80%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	24	12	12	100	12	48	80%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	4	4	3	100	4	12	80%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	4	2	2	100	2	8	80%

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	4	2	2	100	2	8	80%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	0	0	1	1	1	2	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	60	24	12	12	100	12	48	80%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18	4	5	5	100	5	14	78%
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	0	0%	0%	0%	100%	100%	100%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan koordinasi/sinergi								

	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	4	0	0	0	0	1	1	25%
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	0	0	0	0	1	1	25%
7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan	0%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.01.02.02.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.02.02.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	0	0	0	0	1	100%

7.01.04.02.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.04.02.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	600	200	150	150	100	150	450	83%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	280	0	280	280	100	0	280	100%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140	56	28	28	100	28	56	80%
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	1	1	1	100	1	3	75%

7.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.03.02.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	5	2	1	1	100	1	4	80%
7.01.03.02.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	1	1	1	100	1	4	80%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	70	28	14	14	100	14	42	77%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11	0	3	3	100	8	11	100%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	2	0	0	0	1	3	75%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	2	1	1	100	1	3	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Rancaekek sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja, sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan.

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancaekek merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun

sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel T.C-30 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Rancaekek.

Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancaekek
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2(2023)	Tahun n-1(2024)	Tahun n(2025)	Tahun n+1(2026)	Tahun n-2(2023)	Tahun n-1(2024)	Tahun n(2025)	Tahun n+1(2026)	
1	Indek Kepuasan Masyarakat			84%	86%	88%	90%	84,96%	84,96%	89%	90%	Peningkatan 2 % tiap tahun
2	Nilai LKIP			69 point	75,50 point	77 point	78 point	75,30 point	77,80 point	80,00 point	82 point	Kenaikan 2 poin tiap tahun
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik			82%	83%	84%	85%	83%	84%	85%	86%	Kenaikan 1%
4	Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik			100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	Perubahan IKU tahun 2025 dan 2026 (indikator susah diukur)
5	Jumlah Desa Cepat Berkembang			0	0	3	3	0	3	4	4	Perubahan IKU tahun 2025 dan tahun 2026(lebih mudah dan jelas pengukurannya)

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Kinerja Kecamatan Rancaekek

Kinerja OPD Kecamatan Rancaekek dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,

Tugas Pokok Camat/ Kecamatan

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Fungsi Camat/Kecamatan

- a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancaekek berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap bulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan :

Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, berdasarkan Keputusan Bupati nomor 137/Kep.769-

TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat mandat yang terdiri dari :

1. Kewenangan Seragam untuk Seluruh Camat sebanyak 16 Urusan Pemerintahan;
2. Kewenangan Tidak Seragam untuk Camat Tertentu sebanyak 5 Urusan Pemerintahan.

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Permasalahan :

- a. Kinerja SDM Aparatur belum optimal,
- b. masih lemahnya Tingkat Pemahaman Tugas Fungsi Individu kaitan bidang tugasnya,
- c. masih rendahnya Inisiatif dan Kreatifitas Aparatur
- d. belum optimalnya Pelayanan kepada masyarakat yang selalu menginginkan kecepatan, ketepatan dan berkeadilan,
- e. belum optimalnya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung,
- f. belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, Khususnya Kecamatan (Kewilayahan), Terutama dalam Penentuan Indikator Kinerja yang sering berubah – ubah meskipun Tujuan dan Sasaran di Kecamatan relatif sama,
- g. belum optimalnya pemahaman terhadap Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sehingga Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan masih terdapat yang tidak sejalan dengan pelipahannya sehingga Program dan Kegiatan sebagiannya persis sama dengan yang dilaksanakan di tingkat Dinas

dan permasalahan tersebut sangat berakibat terhadap ketepatan dan kecepatan pelayanan,

- h. kurang seimbangnya pelimpahan kewenangan dalam Peraturan Bupati yang baru dengan anggaran keuangan yang di berikan kepada kecamatan,
- i. masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan atau prosedur pelayanan publik di Kecamatan,
- j. belum optimalnya partisipasi lembaga/masyarakat tingkat kecamatan;
- k. belum optimalnya koordinasi Dinas/Badan dengan Kecamatan,
- l. belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainnya) berupa Taman Alun – Alun sebagai Ruang Terbuka Publik,

Hambatan :

- a. Sarana dan Prasarana belum lengkap,
- b. Standar Operasioanl Prosedur (SOP) yang belum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan,
- c. Belum optimalnya penerpan SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan,

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan masukan dan solusinya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya.

4. Tantangan dan Peluang

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya tantangan, baik tantangan dari internal maupun eksternal, baik tantangan yang sudah terprediksi maupun tantangan yang tidak terprediksi. Adapun tantangan tersebut adalah :

A. Tantangan

1) Internal

- a. SDM Aparatur yang masih perlu adanya peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan pelayanan prima,
- b. penunjang kerja yang perlu perbaikan dan penyesuaian,
- c. sinergitas dan soliditas unit kerja belum optimal,
- d. penunjang Operasional aparatur terutama untuk tingkat Staf/ Pengelola/ Pelaksana (Menunjang Operasional Dinas luar) menunjang mobilitas aparatur berupa kendaraan operasional yang perlu diperbaharui.

1) Ekternal

- a. masih rendahnya tingkat pemahaman Masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan pelayanan yang ada di Kecamatan,
- b. rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan,
- c. Rendahnya masyarakat dalam menciptakan Lingkungan yang bersih dan Sehat,
- d. Belum optimalnya dukungan Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan lingkungan,
- e. Pelimpahan kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati ke kecamatan perlu diimbangi dengan anggaran untuk masing-masing Kecamatan,
- f. Masih rendahnya pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Desa di Tingkat Desa.

B. Peluang

- 1) Dukungan Jumlah Aparatur PNS dan Non PNS,
- 2) Sarana dan Prasarana Kecamatan (meskipun masih perlu peningkatan kapasitas Kualitas dan kapasitasnya),
- 3) Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan,
- 4) Semangat dan Komitmen Aparatur Kecamatan sangat tinggi untuk mendukung Kecamatan Rancaekek yang lebih maju dan semakin baik,
- 5) Trend Positif Kinerja aparatur Kecamatan Rancaekek,
- 6) Respon masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan tinggi

5. Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan atau memfasilitasi aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab atau mandiri.
- 2) Melaksanakan Pembinaan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Peraturan dan Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur.
- 3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
- 4) Penyusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang.
- 5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil analisi terdapat perbedaan sehingga perlu adanya review untuk menghasilkan perencanaan yang akurat dan komprehensif terhadap kebutuhan di Kantor Kecamatan. (Lihat Tabel T.C-31)

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.

Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan.

Tabel T.C-31
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2025
Kabupaten Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7	KEWILAYAHAN	Rancaekek	Nilai AKIP	77 Point				Nilai AKIP	78 Point		
7.1	KECAMATAN		Persentase BMD dalam kondisi baik	84%				Persentase BMD dalam kondisi baik	84%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rancaekek	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.983.113.446	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rancaekek	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.086.522.674	
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rancaekek	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	132.101.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rancaekek	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	238.101.000	
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19.000.000	
1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.250.000	
1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	3.250.000	

			Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD			
1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rancaekek	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	52.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rancaekek	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	43.923.000	
1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rancaekek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rancaekek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	98.254.250	
1.2.01.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rancaekek	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	48.500.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rancaekek	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.852.000	

1.2.01.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah	Rancaekek	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	56 Data	14.601.000	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Rancaekek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah	56 Data	12.391.000	
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rancaekek	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.512.110.677	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rancaekek	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.610.187.998	
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rancaekek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	5.508.110.677	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rancaekek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	6.606.187.998	
1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rancaekek	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rancaekek	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000	
1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rancaekek	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rancaekek	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000	
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rancaekek	Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	147.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rancaekek	Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	36.164.235	
1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rancaekek	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	21.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rancaekek	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	21.500.000	
1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rancaekek	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rancaekek	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	0	

1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rancaekek	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	126.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rancaekek	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	14.664.235
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rancaekek	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	153.996.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rancaekek	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	179.696.500
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Rancaekek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rancaekek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	10.000.000
1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rancaekek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rancaekek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.290.400
1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rancaekek	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	47.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rancaekek	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	27.000.000
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rancaekek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.996.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rancaekek	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	16.705.600
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.000.000
1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rancaekek	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rancaekek	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.000.000

1.2.06.9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	53.700.500	
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rancaekek	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	157.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rancaekek	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	187.347.922	
1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rancaekek	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	106.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rancaekek	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	82.251.000	
1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Rancaekek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	20.900.000	Pengadaan Mebel	Rancaekek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	78.210.922	
1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rancaekek	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rancaekek	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	26.886.000	
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rancaekek	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan daerah	100%	612.505.769	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rancaekek	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan daerah	100%	658.705.769	
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.003.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.003.000	
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.500.000	

1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	545.002.769	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rancaekek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	576.202.769	
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rancaekek	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	267.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rancaekek	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	217.500.000	
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rancaekek	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rancaekek	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	70.000.000	
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rancaekek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	17.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Rancaekek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	17.500.000	
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rancaekek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rancaekek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	130.000.000	
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	88%				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	88%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rancaekek	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	300.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rancaekek	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	602.800.000	
2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rancaekek	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	12.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rancaekek	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	2.895.000	

2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rancaekek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rancaekek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2.895.000	
2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0	
2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rancaekek	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	12.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rancaekek	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	59.390.000	
2.2.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	0	
2.2.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	0	
2.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	59.390.000	

2.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rancaekek	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	65.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rancaekek	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	51.945.000	
2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rancaekek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 dokumen	65.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rancaekek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 dokumen	51.945.000	
2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rancaekek	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	530.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rancaekek	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	488.570.000	
2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rancaekek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17 Laporan	530.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rancaekek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17 Laporan	488.570.000	
			Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang	4 Desa				Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang	4 Desa		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rancaekek	Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang	100%	2.804.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rancaekek	Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang	3 desa	2.681.044.240	
3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rancaekek	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	2.634.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rancaekek	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	2.591.766.940	

3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	
3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	784.500.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	1.284.500.000	
3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	1.760.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	1.252.674.940	
3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	15.000.000	Evaluasi Kelurahan	Rancaekek	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	9.592.000	
3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rancaekek	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	92.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rancaekek	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	36.507.300	
3.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rancaekek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	46.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rancaekek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.185.700	
3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rancaekek	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	46.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rancaekek	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.321.600	
3.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rancaekek	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	78.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rancaekek	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	52.770.000	

3.2.06.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	1.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10 Keluarga	0
3.2.06.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	500.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10 Keluarga	0
3.2.06.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	500.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga	0
3.2.06.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	25.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Keluarga	20.190.000

3.2.06.8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	500.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	0
3.2.06.9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	500.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10 Keluarga	0
3.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	25.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	16.395.000
3.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	25.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rancaekek	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	16.185.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rancaekek	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	50.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rancaekek	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	47.478.000
4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rancaekek	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rancaekek	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0

4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rancaekek	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	0
4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rancaekek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rancaekek	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0
4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rancaekek	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada	100%	50.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rancaekek	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada	100%	47.478.000
4.2.02.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rancaekek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	50.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rancaekek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	47.478.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rancaekek	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	188.622.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rancaekek	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 poin	175.176.000
5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rancaekek	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	188.622.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rancaekek	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	175.176.000

5.2.01.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rancaekek	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	28 orang	75.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rancaekek	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	28 orang	75.000.000	
5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rancaekek	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140 laporan	68.622.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rancaekek	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140 laporan	60.504.000	
5.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Ranacekek	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	0	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Ranacekek	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	0	
5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Ranacekek	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	45.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Ranacekek	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	39.672.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rancaekek	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	192.378.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rancaekek	Persentase desa yang dibina dan diawasi	3 desa	115.794.000	
6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rancaekek	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	192.378.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rancaekek	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	115.794.000	

6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rancaekek	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	67.378.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rancaekek	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen	28.013.100	
6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rancaekek	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rancaekek	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 dokumen	0	
6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rancaekek	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rancaekek	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	60.000.000	
6.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 dokumen	65.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rancaekek	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 dokumen	27.780.900	
Jumlah					10.837.613.446	Jumlah					11.708.814.914

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa/Kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa/Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa/Kelurahan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Perangkat Daerah Sesuai Verifikasi Forum Perangkat Daerah sehingga banyak Usulan Kecamatan yang tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Disamping Usulan Musrenbang Reguler Tahun 2024 dan Tahun 2025 terdapat Reward Musrenbang Kompetitif (Musti) Bedas.

Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan

Tabel T-C.32
Usulan Musrenbang Reguler Tahun 2025
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
		N	I	H	I	L

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tidak masuk pada Renstra dan Renja Kecamatan tetapi usulan dari Desa diolah melalui Musyawarah Pembangunan baik Reguler dan Kompetitif Kecamatan yang diusulkan melalui Perangkat Daerah untuk disetujui masuk dalam Renja PD tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja PD yang ada Kewilayahannya untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut didasarkan pada permasalahan yang ada di Desa - desa se Kecamatan Rancaekek yang disinkronkan dengan program/kegiatan/sub.kegiatan yang ditawarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki pagu kewilayahan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
3. Dukungan terhadap Program-Program Strategis dan Prioritas baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan

merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melalui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Tujuan dan Sasaran Renja 2025 Kecamatan Rancaekek disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rancaekek

No.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1.	Meningkatnya pelaksanaan Penunjang Urusam Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			
1.1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peresentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.1.1	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	
1.1.2	Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4	Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.5	Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	

						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.7	Meningkatnya kualitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.8	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.9	Meningkatnya kualitas Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1.2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.2.1	Meningkatnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1.2.3	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
1.3.1	Meningkatnya kualitas pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1.3.2	Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	

	Sistem Informasi Kepegawaian	Kepegawaian				Sistem Informasi Kepegawaian	
1.3.3	Meningkatnya kualitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	
14.1	Meningkatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.4.2	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
1.4.3	Meningkatnya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1.4.4.	Meningkatnya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.5	Meningkatnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
1.4.6	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
1.4.7	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.5.1	Meningkatnya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
1.5.2.	Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

1.5.3.	Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1.6	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Capaian pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		
1.6.1.	Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah	
1.7	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.7.1	Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
1.7.2	Meningkatnya Pengadaan Mebel	Tersedianya jenis mebeuler yang di beli	Pengadaan Mebel			Jumlah jenis mebeuler yang di beli	
1.7.3	Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
1.8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah		
1.8.1	Meningkatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1.8.2	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.8.3	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	

2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2.1	Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.1.1	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.2	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
2.2.1	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum			
3.1	Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada		

3.1.1	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tercapainya keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			
4.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		
4.1.1	Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
4.1.2	Meningkatnya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
4.1.3	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan			
5.1	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
5.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
5.1.2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
5.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
5.1.4	Meningkatnya Evaluasi Kelurahan	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	
5.2	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		
5.2.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
5.2.2	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

5.3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
5.3.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
5.3.2	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
5.3.3	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
5.3.4	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
5.3.5	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	

5.3.6	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
5.3.7	Meningkatnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
5.3.8	Meningkatnya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
6.1	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
6.1.1	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya aparatur pemerintah desa yang dibina	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	
6.1.2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.3	Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
6.1.4	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Program/kegiatan/subkegiatan Kecamatan Rancaekek
(Rancangan Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
I.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
I.1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
I.1.1	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	
I.1.2	Meningkatnya Kualitas Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
I.1.3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
I.1.4	Meningkatnya Kualitas DPA SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
I.1.5	Meningkatnya Kualitas Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	

I.1.6	Meningkatnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
I.1.7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
I.1.8	Meningkatnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
I.1.9	Meningkatnya Kualitas Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
I.b	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
I.b.1	Meningkatnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
I.b.2	Meningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
I.b.3	Meningkatnya kualitas Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
I.c	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
I.c.1	Meningkatnya kualitas pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	

I.c. 2	Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
I.c. 3	Meningkatnya kualitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
I.d	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
I.d. 1	Meningkatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
I.d. 2	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
I.d. 3	Meningkatnya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
I.d. 4	Meningkatnya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
I.d. 5	Meningkatnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
I.d. 6	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
I.d. 7	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
I.e	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
I.e. 1	Meningkatnya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

I.e. 2	Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
I.e. 3	Meningkatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
I.f	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Capaian pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		
I.f.1	Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah	
I.g	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
I.g. 1	Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
I.g. 2	Meningkatnya Pengadaan Mebel	Tersedianya jenis mebeuler yang di beli	Pengadaan Mebel			Jumlah jenis mebeuler yang di beli	
I.g. 3	Meningkatnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
I.h	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah		
I.h. 1	Meningkatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

I.h. 2	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
I.h. 3	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
II.1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		
II.1. 1	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
II.1. 2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
II.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain		
II.2. 1	Meningkatnya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
II.2. 2	Meningkatnya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	

II.2. 3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
II.3	Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
II.3. 1	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
	Meningkatnya Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	
II.4	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
II.4. 1	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
II.4. 2	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	
II.4. 3	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
III	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan			

				ketertiban umum			
III. 1	Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
III.1 .1	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
IV	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tercapainya keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
IV. 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
IV.1 .1	Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
IV.1 .2	Meningkatnya Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

IV.1 .3	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersedianya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
V.	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan Pembedayaan Masyarakat desa dan kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina			
V.1	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa		
V.1. 1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
V.1. 2	Meningkatnya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
V.1. 3	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
V.2	Meningkatnya Pembedayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Kelurahan		
V.2. 1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
V.2. 2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
V.2. 3	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	

V.2.4	Meningkatnya Evaluasi Kelurahan	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	
V.3	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		
V.3.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	
V.3.2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
V.3.3	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	
V.3.4	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
V.3.5	Meningkatnya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
V.4	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
V.4.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
V.4.2	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	

V.4.3	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
V.4.4	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
V.4.5	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
V.4.6	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
V.4.7	Meningkatnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
V.4.8	Meningkatnya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
VI	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa			

VI.1	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang dibina dan diawasi		
VI.1.1	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya aparatur pemerintah desa yang dibina	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	
VI.1.2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
VI.1.3	Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
VI.1.4	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi Nomor 4 yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, dan kaitan dengan hal tersebut Kecamatan Rancaekek melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorientasi pada Misi No 4. Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Rancaekek dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah mendukung terhadap Visi dan Misi Kabupaten Bandung yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang **“(BEDAS) Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”** .sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Sasaran – sasaran yang merupakan satu Kesatuan yang dapat mendorong terciptanya Pelayanan yang optimal di Kecamatan Rancaekek.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Rancaekek :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik,
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan,
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2025-2029 mendatang Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”**

Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rancangan RPJMD dia atas dan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029 bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk misi ke-3, yaitu: **Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.**

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan

dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”**. Untuk pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bandung merumuskan konsep Bandung Bedas Manunggal sebagai konsep kebijakan integrated planning atau perencanaan terpadu yang mengedepankan inovasi, integrasi, dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan berbasis tematik desa. Tahun 2025 menjadi tahun ke- 4 konsep kebijakan ini diimplementasi di Kabupaten Bandung.

Misi Nomor 4 yaitu Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan telah menjadi kewajiban bagi OPD khusus Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Rancaekek.

Jika Mengacu kepada Rancangan RPJMD dan Renstra Kecamatan Rancaekek Tahun 2025-2029, maka dalam kurun waktu periode 2025-2029 mendatang Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”**, dan Kecamatan akan mewujudkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada misi ke-3, yaitu: **Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel**.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub. kegiatan

Adapun Program, kegiatan dan sub. kegiatan yang akan dilaksanakan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan antara lain :

<p>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja</p>
--	---	---

- Perangkat Daerah
8. Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 9. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah
 10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 13. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 14. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 20. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 21. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
 22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 23. Pengadaan Mebel
 24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 29. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- | | | |
|--|---|--|
| <p>2. PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN
PUBLIK</p> | <p>8. Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan</p> | <p>31. Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait</p> |
| | <p>9. Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang Tidak
Dilaksanakan oleh
Unit Kerja
Perangkat Daerah
yang Ada di
Kecamatan</p> | <p>32. Peningkatan Efektivitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan</p> |
| | <p>10. Koordinasi
Pemeliharaan
Prasarana dan
Sarana Pelayanan
Umum</p> | <p>33. Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/Instansi
vertical terkait dalam
pemeliharaan sarana
dan prasarana
pelayanan umum</p> |
| | <p>11. Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
yang
Dilimpahkan
kepada Camat</p> | <p>34. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan</p> |
| <p>3. PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN</p> | <p>12. Kegiatan
Pemberdayaan
Kelurahan</p> | <p>35. Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan</p> |
| | | <p>36. Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan</p> |
| | | <p>37. Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan</p> |
| | | <p>38. Evaluasi Kelurahan</p> |
| | <p>13. Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat
Kecamatan</p> | <p>39. Peningkatan Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakatan</p> |
| | | <p>40. Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat</p> |
| | <p>14. Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga Tingkat
Kecamatan dan
Kelurahan</p> | <p>41. Peningkatan Ketahanan
Pangan Keluarga</p> |
| | | <p>42. Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Mewujudkan Rumah
Sehat dan Layak Huni
serta Kesadaran Hukum
tentang Kepemilikan
Rumah</p> |
| | | <p>43. Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Peningkatan Pendidikan
dan Keterampilan untuk
Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang</p> |

- Berkualitas dan Berdaya Saing
44. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 45. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 46. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
 47. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 48. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
 49. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 50. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional,
 51. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional,
 52. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
 53. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 54. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 55. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan
4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
15. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
 16. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 17. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Desa
 56. Fasilitasi Pelaksanaan
 Tugas, Fungsi, dan
 Kewajiban Lembaga
 Kemasyarakatan

c. Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub. Kegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran antara Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Rancaekek dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel T.C-33 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Rancaekek pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan, sehingga target kinerja yang sudah di rencanakan dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel. T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung

OPD : Kecamatan Rancaekek

Kode							Urusan/Bidang Urusan PD dan /Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
											Ranwal Teknokratik (Perda RPJMD)	Perubahan Renja				
							Nilai AKIP	Kec. Rancaekek	76				77			
							Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Kec. Rancaekek	85				86			
						7	KEWILAYAHAN	Kec. Rancaekek	88				89			
						7.1	Kecamatan	Kec. Rancaekek								
x	xx	xx	xx	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Rancaekek	100%	6.741.159.285	8.086.522.674	APBD Kab. Bandung	100%	6.742.159.285	
x	xx	xx	xx	1	2.0	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	100%	6.000.000	196.920.250	APBD Kab. Bandung	100%	7.000.000	
x	xx	xx	xx	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	4 Dokumen	2.000.000	19.000.000	APBD Kab. Bandung	4 Dokumen	2.000.000	
x	xx	xx	xx	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	250.000	3.250.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	250.000	

x	xx	xx	xx	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	250.000	3.250.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	250.000
x	xx	xx	xx	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	250.000	3.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	250.000
x	xx	xx	xx	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	250.000	3.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	250.000
x	xx	xx	xx	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rancaekek	4 Laporan	2.500.000	43.923.000	APBD Kab. Bandung	4 Laporan	2.500.000
x	xx	xx	xx	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	1 Laporan	500.000	98.254.250	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	500.000
x	xx	xx	xx	1	2.01	8	Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Rancaekek	1 Laporan	0	10.852.000	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	500.000
x	xx	xx	xx	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah	Kec. Rancaekek	1 Laporan	0	12.391.000	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	500.000
x	xx	xx	xx	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	100%	6.079.057.516	6.610.187.998	APBD Kab. Bandung	100%	6.079.057.516

x	xx	xx	xx	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rancaekek	29 Orang/1 2 bulan	6.075.057.516	6.606.187.998	APBD Kab. Bandung	30 Orang/1 2 bulan	6.075.057.516
x	xx	xx	xx	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Rancaekek	2 Laporan	2.000.000	2.000.000	APBD Kab. Bandung	2 Laporan	2.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	2.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kec. Rancaekek	100%	2.000.000	36.164.235	APBD Kab. Bandung	100%	2.000.000,00
x	xx	xx	xx	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Rancaekek	1 paket	1.000.000	21.500.000	APBD Kab. Bandung	1 paket	1.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.05	4	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Kec. Rancaekek	1 dokumen	500.000	0	APBD Kab. Bandung	0 dokumen	500.000
x	xx	xx	xx	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rancaekek	30 orang	500.000	14.664.235	APBD Kab. Bandung	30 orang	500.000
x	xx	xx	xx	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Rancaekek	100%	76.996.000	179.696.500	APBD Kab. Bandung	100%	76.996.000
x	xx	xx	xx	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	10.000.000	10.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000

x	xx	xx	xx	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	20.000.000	50.290.400	APBD Kab. Bandung		1 Paket	20.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	8.000.000	27.000.000	APBD Kab. Bandung		1 Paket	8.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	0		APBD Kab. Bandung		1 Paket	
x	xx	xx	xx	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	9.996.000	16.705.600	APBD Kab. Bandung		1 Paket	9.996.000
x	xx	xx	xx	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Rancaekek	2 Dokumen	6.000.000	12.000.000	APBD Kab. Bandung		2 Dokumen	6.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rancaekek	12 Laporan	8.000.000	10.000.000	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	8.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rancaekek	12 Laporan	15.000.000	53.700.500	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	15.000.000
x	xx	xx	xx					BMD dalam Kondisi baik/Laik	Kec. Rancaekek	84%					86%	
x	xx	xx	xx	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rancaekek	100%	10.900.000	187.347.922	APBD Kab. Bandung		100%	10.900.000
x	xx	xx	xx	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Rancaekek	3 unit	1.000.000	78.210.922	APBD Kab. Bandung		5 unit	1.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebeuler yang di beli	Kec. Rancaekek	2 unit	5.900.000	78.210.922	APBD Kab. Bandung		2 unit	5.900.000
x	xx	xx	xx	1	2.07	11	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Rancaekek	2 unit	4.000.000	26.886.000	APBD Kab. Bandung		2 unit	4.000.000

x	xx	xx	xx	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rancaekek	100%	526.205.769	658.705.769	APBD Kab. Bandung		100%	526.205.769
x	xx	xx	xx	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rancaekek	12 Laporan	6.003.000	11.003.000	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	6.003.000
x	xx	xx	xx	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	55.500.000	71.500.000	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	55.500.000
x	xx	xx	xx	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang di service/diperbaiki	Kec. Rancaekek	12 bulan	0	0	APBD Kab. Bandung		0 bulan	0
x	xx	xx	xx	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	464.702.769	576.202.769	APBD Kab. Bandung		12 Laporan	464.702.769
x	xx	xx	xx	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	Kec. Rancaekek	100%	40.000.000	217.500.000	APBD Kab. Bandung		100 %	40.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Rancaekek	3 unit	15.000.000	70.000.000	APBD Kab. Bandung		3 unit	15.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Rancaekek	2 unit	5.000.000	17.500.000	APBD Kab. Bandung		2 unit	10.000.000
x	xx	xx	xx	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Rancaekek	2 unit	20.000.000	130.000.000	APBD Kab. Bandung		2 unit	15.000.000
							Jumlah I				6.741.159.285	8.086.522.674				6.742.159.285
								Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		88%					89%	
x	xx	xx	xx	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Rancaekek	100%	300.000.000	602.800.000	APBD Kab. Bandung		100%	300.000.000

x	xx	xx	xx	2	2.0 1	0	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kec. Rancaekek	100%	4.000.000	2.895.000	APBD Kab. Bandung		100%	4.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.01	1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kec. Rancaekek	1 laporan	2.000.000	2.895.000	APBD Kab. Bandung		1 laporan	2.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.01	2	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Rancaekek	1 dokumen	2.000.000	0	APBD Kab. Bandung		1 dokumen	2.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.0 2	0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Rancaekek	100%	6.000.000	59.390.000	APBD Kab. Bandung		100%	6.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kec. Rancaekek	1 dokumen	2.000.000	0	APBD Kab. Bandung		1 dokumen	2.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.02	2	Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	Kec. Rancaekek	1 laporan	2.000.000	0	APBD Kab. Bandung		1 laporan	2.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.02	3	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Rancaekek	1 laporan	2.000.000	59.390.000	APBD Kab. Bandung		1 laporan	2.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.0 3	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Rancaekek	100%	40.000.000	51.945.000	APBD Kab. Bandung		100%	40.000.000

x	xx	xx	xx	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rancaekek	12 Laporan	40.000.000	51.945.000	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	40.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Rancaekek	100%	250.000.000	488.570.000	APBD Kab. Bandung	100%	250.000.000
x	xx	xx	xx	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	250.000.000	488.570.000	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	250.000.000
x	xx	xx	xx					Persentase Desa yang beradministrasi baik	Kec. Rancaekek	100%			APBD Kab. Bandung	100%	
x	xx	xx	xx	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Rancaekek	100%	2.750.000.000	2.681.044.240	APBD Kab. Bandung	100 %	2.750.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rancaekek	100%	0	0	APBD Kab. Bandung	100 %	0
x	xx	xx	xx	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rancaekek	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	APBD Kab. Bandung	6 Lembaga Kemasyarakatan	0
x	xx	xx	xx	3	2.02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kec. Rancaekek	100%	2.650.000.000	2.591.766.940	APBD Kab. Bandung	100%	2.650.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rancaekek	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	45.000.000	APBD Kab. Bandung	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000

x	xx	xx	xx	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Rancaekek	3 Unit	784.500.000	1.284.500.000	APBD Kab. Bandung		3 Unit	784.500.000
x	xx	xx	xx	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rancaekek	16 Pokmas / Ormas	1.830.500.000	1.252.674.940	APBD Kab. Bandung		16 Pokmas / Ormas	1.830.500.000
x	xx	xx	xx	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Rancaekek	1 Laporan	15.000.000	9.592.000	APBD Kab. Bandung		1 Laporan	15.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.03	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rancaekek	100%	92.000.000	36.507.300	APBD Kab. Bandung		100 %	92.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Rancaekek	1 Lembaga Kemasyarakatan	46.000.000	26.185.700	APBD Kab. Bandung		1 Lembaga Kemasyarakatan	46.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rancaekek	1 Laporan	46.000.000	10.321.600	APBD Kab. Bandung		0 kegiatan	46.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.06	0	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kec. Rancaekek	100%	8.000.000	52.770.000			100%	8.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	0			10 Keluarga	1.000.000

x	xx	xx	xx	3	2.06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	0			10 Keluarga	1.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	0			10 Keluarga	1.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	20.190.000			10 Keluarga	1.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	0			10 Keluarga	1.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	0			10 Keluarga	1.000.000

x	xx	xx	xx	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	16.395.000			10 Keluarga	1.000.000
x	xx	xx	xx	3	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	1.000.000	16.185.000			10 Keluarga	1.000.000
x	xx	xx	xx					Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec. Rancaekek	88%			APBD Kab. Bandung		89%	
x	xx	xx	xx	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Rancaekek	100%	30.000.000	47.478.000	APBD Kab. Bandung		100%	30.000.000
x	xx	xx	xx	4	2.01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rancaekek	100%	5.000.000	0	APBD Kab. Bandung		100%	5.000.000
x	xx	xx	xx	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rancaekek	1 laporan	2.500.000	0	APBD Kab. Bandung		0 laporan	2.500.000
x	xx	xx	xx	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rancaekek	1 laporan	2.500.000	0	APBD Kab. Bandung		0 laporan	2.500.000
x	xx	xx	xx	4	2.02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkara	Kec. Rancaekek	100%	25.000.000	47.478.000	APBD Kab. Bandung		100%	25.000.000

x	xx	xx	xx	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Rancaekek	2 Laporan	25.000.000	47.478.000	APBD Kab. Bandung	2 laporan	25.000.000
x	xx	xx	xx				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec. Rancaekek	88%					89%	
x	xx	xx	xx	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kec. Rancaekek	100%	138.622.000	175.176.000	APBD Kab. Bandung	100%	140.000.000
x	xx	xx	xx	5	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Kec. Rancaekek	100%	138.622.000	175.176.000	APBD Kab. Bandung	100 %	140.000.000
x	xx	xx	xx	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rancaekek	50 Orang	38.622.000	75.000.000	APBD Kab. Bandung	140 Orang	40.000.000
x	xx	xx	xx	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Rancaekek	140 Orang	0	0	APBD Kab. Bandung	0 Orang	0

x	xx	xx	xx	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Rancaekek	140 Orang	50.000.000	60.504.000	APBD Kab. Bandung	140 Orang	50.000.000
x	xx	xx	xx	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	5.000.000	0		0 laporan	5.000.000
x	xx	xx	xx	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Rancaekek	1 dokumen	45.000.000	39.672.000	APBD Kab. Bandung	1 dokumen	45.000.000
x	xx	xx	xx	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kec. Rancaekek	100%	131.378.000	115.794.000	APBD Kab. Bandung	100 %	131.378.000
x	xx	xx	xx	6	2.01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Rancaekek	100%	131.378.000	115.794.000	APBD Kab. Bandung	140 orang	131.378.000
x	xx	xx	xx	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	Kec. Rancaekek	1 Kegiatan	50.000.000	28.013.100	APBD Kab. Bandung	1 Kegiatan	50.000.000
x	xx	xx	xx	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	5.000.000	0	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	0

x	xx	xx	xx	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	31.378.000	60.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	31.378.000
x	xx	xx	xx	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rancaekek	2 Dokumen	45.000.000	27.780.900	APBD Kab. Bandung	2 Dokumen	50.000.000
							Jumlah 2				3.350.000.000	3.622.292.240			3.351.378.000
							Jumlah Total (1+2)				10.091.159.285	11.708.814.914			10.093.537.285

Mengetahui/Menyetujui
Camat Rancaekek

Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si
NIP. 19671110 199402 1 003

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD).

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan target perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Rencana kerja dan pendanaan berupa Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Kecamatan Rancaekek sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Perubahan Anggaran Kecamatan Rancaekek Tahun 2025

No	Sasaran	Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025(Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting
										Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10
								7	KEWILAYAHAN						
								7.1	Kecamatan						
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayan Publik	x	xx	xx	xx	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Rancaekek	100%	8.086.522.674	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	100%	238.101.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	4 Dokumen	19.000.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	3.250.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	3.250.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	3.000.000	APBD Kab. Bandung	

		x	xx	xx	xx	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	3.000.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rancaekek	4 Laporan	43.923.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	1 Laporan	98.254.250	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	8	Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Kec. Rancaekek	1 Laporan	10.852.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik sektoral Daerah	Kec. Rancaekek	1 Laporan	12.391.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Rancaekek	100%	5.512.110.677	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rancaekek	29 Orang/12 bulan	5.508.110.677	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Rancaekek	2 Laporan	2.000.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	2.000.000	APBD Kab. Bandung	

		x	xx	xx	xx	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kec. Rancaekek	100%	147.500.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Rancaekek	1 paket	21.500.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.05	4	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	Kec. Rancaekek	1 dokumen	0	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rancaekek	30 orang	126.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Rancaekek	100%	153.996.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	10.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	20.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	47.000.000	APBD Kab. Bandung
						1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket		APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Rancaekek	1 Paket	19.996.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Rancaekek	2 Dokumen	12.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rancaekek	12 Laporan	15.000.000	APBD Kab. Bandung

		x	xx	xx	xx	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rancaekek	12 Laporan	30.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rancaekek	100%	157.400.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Rancaekek	3 unit	106.500.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebeuler yang di beli	Kec. Rancaekek	2 unit	20.900.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.07	11	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Rancaekek	2 unit	30.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rancaekek	100%	612.505.769	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rancaekek	12 Laporan	6.003.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	61.500.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	545.002.769	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	Kec. Rancaekek	100%	267.500.000	APBD Kab. Bandung

		x	xx	xx	xx	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Rancaekek	3 unit	60.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Rancaekek	2 unit	17.500.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Rancaekek	2 unit	190.000.000	APBD Kab. Bandung
									Jumlah 1				6.983.113.446	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	x	xx	xx	xx	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Rancaekek	100%	619.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.01	0	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kec. Rancaekek	100%	12.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.01	1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Rancaekek	1 laporan	12.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.01	2	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Rancaekek	1 dokumen	0	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.02	0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Rancaekek	100%	12.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kec. Rancaekek	1 dokumen	0	APBD Kab. Bandung

		x	xx	xx	xx	2	2.02	2	Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	Kec. Rancaekek	1 laporan	0	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.02	3	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Rancaekek	1 laporan	12.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.03	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Rancaekek	100%	65.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rancaekek	12 Laporan	65.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.04	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Rancaekek	100%	530.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	530.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Rancaekek	100%	2.804.500.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	3	2.01	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rancaekek	100%	0	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rancaekek	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	3	2.02	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kec. Rancaekek	100%	2.634.500.000	APBD Kab. Bandung

		x	xx	xx	xx	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Rancaekek	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Rancaekek	3 Unit	784.500.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Rancaekek	16 Pokmas / Ormas	1.760.000.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Rancaekek	1 Laporan	15.000.000	APBD Kab. Bandung	
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa	x	xx	xx	xx	3	2.03	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rancaekek	100%	36.507.300	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Rancaekek	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.185.700	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Rancaekek	1 Laporan	10.321.600	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.06	0	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kec. Rancaekek	100%	52.770.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	0	APBD Kab. Bandung	

		x	xx	xx	xx	3	2.06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	0	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	0	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	20.190.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	0	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	0	APBD Kab. Bandung	

		x	xx	xx	xx	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	16.395.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	3	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Rancaekek	10 Keluarga	16.185.000	APBD Kab. Bandung	
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan	x	xx	xx	xx	4	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Rancaekek	100%	47.478.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	4	2.01	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rancaekek	100%	0	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rancaekek	1 laporan	0	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rancaekek	1 laporan	0	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	4	2.02	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada	Kec. Rancaekek	100%	47.478.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Rancaekek	2 Laporan	47.478.000	APBD Kab. Bandung	

2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan	x	xx	xx	xx	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kec. Rancaekek	100%	175.176.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	5	2.01	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Kec. Rancaekek	100%	175.176.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Rancaekek	50 Orang	75.000.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Rancaekek	140 Orang	60.504.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Rancaekek	12 Laporan	0	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Rancaekek	1 dokumen	39.672.000	APBD Kab. Bandung
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	x	xx	xx	xx	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kec. Rancaekek	100%	115.794.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	6	2.01	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Rancaekek	100%	115.794.000	APBD Kab. Bandung
		x	xx	xx	xx	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah aparaturnya pemerintah desa yang dibina	Kec. Rancaekek	1 Kegiatan	28.013.100	APBD Kab. Bandung

		x	xx	xx	xx	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	0	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Rancaekek	1 Dokumen	60.000.000	APBD Kab. Bandung	
		x	xx	xx	xx	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Rancaekek	2 Dokumen	27.780.900	APBD Kab. Bandung	
									Jumlah 2				3.622.292.240		
									Jumlah Total (1+2)				11.708.814.914		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Rancaekek maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Rancaekek dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub. kegiatan tahun 2024 berdasarkan permasalahan dan analisis Kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perangkat daerah antara lain :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja PD,
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparatur dan sumber daya yang ada,
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dalam meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Rancaekek dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja yang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.

CAMAT RANCAEKEK,

Ttd

DIAR HADI GUSDINAR

BUPATI BANDUNG

TTD

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN RANCAEKEK

Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 89 Telepon. 7798016 Kode Pos 40394

**SURAT PERINTAH CAMAT RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 050/SP.08.a/kec./V/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar

**TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) didasarkan atas Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Surat Perintah Camat Rancaekek Kabupaten Bandung tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

M E M E R I N T A H K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rancaekek Tahun 2025 sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Rancaekek
Pada Tanggal : 26 Mei 2025

CAMAT RANCAEKEK,

Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si.
NIP. 19671110 199402 1 003

**LAMPIRAN SURAT PERINTAH CAMAT RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 050/SP. 08.a/kec/V/2024
TANGGAL : 26 Mei 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si
Camat Rancaekek

Ketua Tim : Dra. NOOR SYAHADAH, M.Si
Sekretaris Kecamatan Rancaekek

Anggota : 1. SUSANTO SUDARSONO SINRING, SH
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

2. ANA SUMARNA, S.Sos., M.AP
Kepala Seksi Pemerintahan

3. JAJANG WAHYUDIN, SE
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

4. YULI HASTUTI, SH
Kepala Seksi Sosial Budaya

5. ANA SUMARNA, S.Sos., M.AP
Kepala Seksi Pembangunan

6. AL AZHAR, S.Sos
Lurah Rancaekek Kencana

7. TATA GUNIAWAN, S.Pd
Kepala Sub Bagian Program dan
Keuangan

8. HAMID MUBAROK, S.SOS., M.Si
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

CAMAT RANCAEKEK

Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si.
NIP. 19671110 199402 1 003

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
RENCANA KERJA KECAMATAN RANCAEKEK TAHUN 2024
KABUPATEN BANDUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksi- sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah Kabupaten dan Agenda Kerja Perangkat Daerah Kabupaten	V			
2	Pengolahan Data dan Informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam Rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan Perkiraan Maju	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah disyahkan	V			

Rancaekek, 18 Juni 2025
Camat Rancaekek

Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si
NIP. 19671110 199402 1 003

MATRIKS KALENDER KEGIATAN
RENCANA KERJA PENYUSUN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 KECAMATAN RANCAEKEK
KABUPATEN BANDUNG

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN
		Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja													
2	Penyusunan Dokumen Renja													
9	Penyampaian Renja kepada Bapperida													
10	Penetapan Renja													

Rancaekek, 26 Mei 2025
CAMAT RANCAEKEK

Ir. H. DIAR HADI GUSDINAR, M.Si
NIP. 19671110 199402 1 003